BAB II

RUANG LINGKUP PERUSAHAAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

2.1. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan

Bagi para pegawai BNI maupun masyarakat luas pada umumnya, sejarah BNI merupakan warisan yang tidak ada bandingannya di sektor perbankan nasional. Suatu warisan yang terkait dengan sejarah kemerdekaan Republik Indonesia.

Lima puluh tujuh tahun sejak lahir dalam semangat perjuangan kemerdekaan, BNI kini menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia, dengan total aktiva mencapai Rp 131,49 triliun pada akhir tahun 2003.

Selama 2003, jajaran manajemen telah melaksanakan beberapa inisiatif penting, diantaranya penerbitan Obligasi I BNI senilai Rp 1,00 triliun dan Obligasi Subordinasi I BNI senilai USD 100 juta pada bulan Juli 2003 yang mencatat kelebihan permintaan masing-masing 2,3 dan 3,7 kali.

Secara makro, kondisi ekonomi sepanjang tahun 2003 cukup kondusif dan relatif stabil. Dilakukannya divestasi saham pemerintah di beberapa Bank BUMN, secara tidak langsung telah menjadi pemicu untuk meningkatkan kompetensi dalam menghadapi persaingan yang makin ketat di masa yang akan datang.

Selain itu, Kuasi-Reorganisasi dan *Reverse Stock Split* berhasil diselesaikan menjelang akhir tahun 2003 setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham. Dengan Kuasi-Reorganisasi, neraca akhir tahun 2003 tidak lagi terbebani oleh defisit, sehingga di tahun mendatang BNI dapat mulai dengan struktur permodalan yang lebih baik.

Sedangkan inisiatif *Reverse Stock Split* dilakukan untuk memperbaiki kinerja likuiditas perdagangan saham di bursa, sejalan dengan rencana divestasi saham pemerintah. Pelaksanaan *Reverse Stock Split* telah meningkatkan harga nominal saham, sehingga secara psikologis harga saham BNI setara dengan *peer group*, dan menjadi lebih menarik di mata investor.

Manajemen juga melakukan rekonfigurasi jaringan distribusi yang bertumpu pada penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, serta mengoptimalkan *platform* perbankan korporasi untuk mengembangkan segmen konsumen dan usaha kecil dan menengah (UKM) melalui pemasaran lintas segmen (*cross selling*).

Strategi lain yang dijalankan sehubungan dengan peningkatan pengelolaan risiko ternyata masih perlu disempurnakan. Terjadinya penyimpangan prosedur dalam penanganan transaksi *Letter of Credit* di salah satu cabang, secara signifikan berdampak negatif pada citra BNI dan secara finansial berdampak pada pencapaian laba yang jauh di bawah target.

Sebagai perwujudan akuntabilitas manajemen atas terjadinya kasus L/C, telah dilakukan perombakan jajaran manajemen puncak pada bulan Desember 2003. Dan sebagai pengemban amanah dari pemegang saham, BNI bertekad meraih kembali kebanggaan dan reputasinya sebagai bank terkemuka. Untuk itu, BNI telah mengambil langkah-langkah komprehensif sehubungan dengan hal ini seperti mengajukan tuntutan hukum atas pelaku kasus penipuan L/C, menemukan dan memperbaiki berbagai kelemahan pada sistem pengendalian internal dan pengelolaan risiko Bank, meninjau kembali nilai dan etika kerja, menyempurnakan strategi usaha, serta mengembangkan arah dan langkah untuk 15 tahun ke depan dalam menjadikan BNI sebagai bank terkemuka kebanggaan nasional.

Melalui Peta Navigasi BNI, disusun langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan sebagai bagian dari proses pengendalian dan penyelesaian krisis, yang dibagi dalam tiga tahap yaitu tahap stabilisasi, pemulihan dan transformasi.

Tahap stabilisasi telah berlangsung dari bulan Januari sampai dengan Maret 2004, mencakup pengangkatan manajemen baru; pendefinisian ulang visi, misi dan strategi; penetapan target dan prioritas baru; serta upaya untuk mendapatkan kembali kepercayaan stakeholders.

Tahap pemulihan ditetapkan mulai bulan April sampai Juli 2004, dan mencakup pencanangan komitmen terhadap 'Zero Fraud Operations'; peningkatan tata kelola perusahaan; penyempurnaan

kebijakan dan pengelolaan sumber daya manusia; serta upaya untuk mengembalikan kemampuan meraih laba seperti sebelum krisis.

Tahap transformasi akan dimulai pada bulan Juli 2004, melalui program rebranding dan identitas perusahaan yang baru; reposisi BNI untuk 'melayani dengan kebanggaan sebagai bank anak negeri' yang unggul dalam pelayanan dan kinerja; serta revitalisasi unit-unit bisnis sebagai motor pertumbuhan usaha.

Pada ketiga tahapan tersebut, BNI akan memberikan perhatian khusus pada upaya pemberdayaan sistem pengendalian internal dan pengelolaan risiko yang lebih ketat sesuai standar praktek internasional terbaik. Secara bertahap, sistem-sistem tersebut juga akan dikembangkan sesuai dengan rekomendasi Basel II Accord, yang antara lain mensyaratkan dimasukkannya risiko pasar dan risiko operasional dalam perhitungan modal minimum bank.

BNI juga akan terus meningkatkan jaringan distribusi, diferensiasi produk, teknologi perbankan, pengelolaan basis data, hubungan nasabah dan kualitas pelayanan. Kami yakin bahwa langkah-langkah yang ditempuh ke arah pemulihan tidak saja akan mampu menciptakan pertumbuhan jangka panjang yang berkesinambungan bagi *stakeholder* BNI, namun juga akan kembali menempatkan BNI sebagai simbol perbankan Indonesia. Untuk itu, kami akan senantiasa menghadirkan produk dan layanan perbankan yang berkualitas kepada jutaan nasabah di semua segmen pasar, mengembangkan

peluang pasar khusus di sektor-sektor dimana BNI memiliki keunggulan pengalaman dan keahlian, serta mengoptimalkan potensi pemasaran-silang di antara segmen perbankan korporasi, komersial dan konsumer. Keseluruhanya ini juga akan membawa perkembangan BNI ke arah skema Arsitektur Perbankan Indonesia.

2.2. Tempat dan Kedudukan Perusahaan

Perusahaan tempat penulis melaksanakan kerja praktek beralamatkan di Jl. Raya Rancaekek No. 105 Rancaekek, yang merupakan salah satu Kantor Perusahaan Anak Bank BNI Tbk, yang berada ditingkat Kabupaten.

2.3. Bentuk dan Badan Hukum Perusahaan

BNI Swadharma berbentuk Perseroaan Terbatas (PT). sesuai dengan ketentuan menteri keuangan setelah mendengar perimbangan Bank Indonesia. Dasar Hukum pembentukan BNI Swadharma adalah :

1. Keputusan Menkeu No. 1064/KMK 00/1988 tanggal 27-10-1988 tentang pendirian dan usaha BNI Swadharma
2. Keputusan Menkeu No. 228/KMK/01/1991 tanggal 28-02-1991 tentang pendirian dan usaha BNI Swadharma
3. Undang-undang No. 7 tahun 1992 tanggal 25-03-1992 mengenai Perbankan

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 tahun 1992 tabggal 30-10-1992 mengenai BNI Swadharma
5. SE BI No. 25/1/BPPP tanggal 17-11-1992, perihal Penyertaan Modal dan Pemilikan Saham oleh Bank
6. Juklak UU dan PP tentang Perbankan tanggal 27-02-1993
7. Undang-undang nom,or 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
8. Direksi No. : 041 tanggal 4 maret 1993,
9. Prsetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. : S-891/MK. 017/1993 tanggal 4 September 1993

2.4. Bidang dan Kegiatan Usaha

BNI Swadharma Rancaekek berbentuk Perusahaan Terbatas yang bergerak dibidang jasa perbankan. Beberapa ketentuan yang mendasari kegiatan usaha BPR adalah :

1. Undang-Undang RI No. 7 tahun 1992 tanggal 25-03-1992 pasal 13, usaha Bank meliputi :
   a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
   b. Memberikan kredit

c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan y ang ditetapkan dalam peraturan pemerintah

d. Menetapkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain

2.5. Bidang dan Pekerjaan Divisi/Departemen tempat kerja praktek

.Bank BNI Swadharma diawasi oleh Dewan Komisaris sedikitnya 2 (dua) orang, seorang diantaranya sebagai Komisaris Utama, diambilkan dari pensiunan BNI atau anggota Pengurus Koperasi Swadharma, diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Khusus calan pengurus yang bukan dari anggota BNI, sebelumnya harus mendapatkan persetujuan Direksi Bank BNI.

Tugas Dewan Komisaris :

1. Aktif melakukan pengawasan atas jalannya kepengurusan secar tertib dan kontinyu
2. Aktif melakukan tugas-tugas secara khusus yang diberikan kepadanya menurut anggaran dasar
3. Meneliti laporan yang disampaikan direktur, dan apabila dianggap perlu dapat mengambil kebijakan yang dianggap perlu sesuai dengan kewenangannya dan hasilnya dilaporkan kepada pemegang saham

Bank BNI Swadharma Rancekek dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang bertanggung jawab kepada Komisaris melalui RUPS. Dalam melaksanakan tugasnya Dirut dibantu oleh Direktur Umum dan Kepala Unit-Unit yang ada.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah badan tertinggi pada struktur organisasi BNI Swadharma, dan terdiri dari orang-orang ahli diluar perusahaan, yang diangkat oleh Menkeu dan Dewan Direksi PT. BNI Tbk., dengan surat keputusan. RUPS merupakan satu-satunya badan yang mempunyai hak penyeliaan, monitoring, serta menerima laporan pertanggung jawaban hasil usaha dari Direktur Utama dan karenanya dapat menunjuk dan memberhentikan pegawai/pensiunan Bank BNI ditempatkan sebagai Komisaris, dengan terlebih dahulu dilakukan fit and profer Bank Indonesia. Sedangkan tugas Direktur Utama adalah :

1. Menetapkan rencana kerja dan anggaran, sasaran usaha dan tujuan-tujuan yang akan dicapai untuk disetujui RUPS.
2. Menyelia (mengawasi, mengarahkan, mengendalikan) secara langsung unit-unit kerja sesuai aktivitas yang dibawahinya
3. Melaporkan hasil kerja perseroan kepada dewan Komisaris setiap bulan atas realisasi rencana kerja anggaran sebagaimana yang harus disyahkan oleh dewan komisaris

Tugas Unit Teller:

1. Menerima dan menandatangani setoran tunaidalam jumlah tak terbatas.
2. Mencatat mutasi keluar masuknya uang tunai dalam dalam buku kas kontrol.
3. Memastiakn bahwa bahwa saldo kas physic selalu sama dengan saldo kas pada rekening pada intracomptabelnya.

Tugas Unit Dana:

1. Memasarkan produk tabungan, deposito, dan jasa-jasa lainnya kepada masyarakat.
2. Melayani pembukaan rekening tabungan dan deposito berjangka.
3. Mengelola register (stambuk) rekening nasabah untuk tabungan dan deposito berjangka.
4. Melayani penutupan rekening tabungan dan deposito berjangka.

Tugas Unit Kredit:

1. Memasarkan kredit kepada masyarakat, baik melallllui instansi pemerintah/swasta, pedagang, pengusaha, rumah tangga, dsb.
2. Melakukan peninjauan usaha dan jaminan atas permohonan kredit calon debitur untuk memverifikasi data-data yang diperlukan.
3. Melakukan penagihan bunga dan angsuran pokok jaminan.

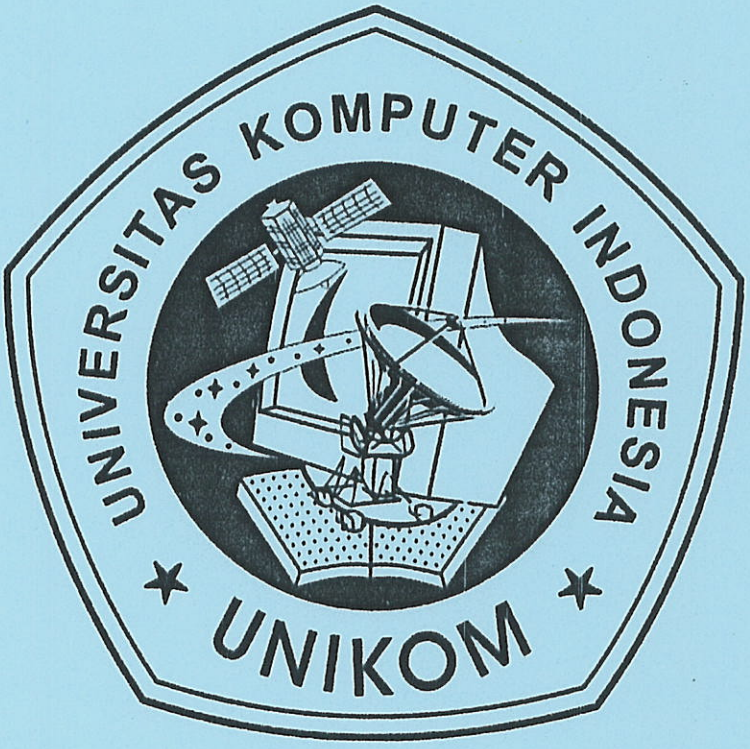
4. Melakukan pemantauan terhaadap usaha debitur atas fasilitas kredit yang diberikan

Tugas Unit Pembukuan:

1. Meyakini bahwwa voucher yang akan dientry suddah benar dan syah, sekaligus mengentry slip kas dan pemindahan.
2. Mengendalikan / mengawwsi transaksi-transaksi yang dibukukan kedalam rekening-rekening financial.
3. Membuat neraca harian dan laporan laba rugi.
4. Menghitung bunga pinjaman.
5. Menyusun ssemmmua laporan keuangan baik untuk kepentingan intern maupun ekstern.

Tugas Unit Umum (termasuk satpam) :

1. Mengelola banguna, kendaraan, dan peralatan kantor.
2. Mengelola kebutuhan alat tulis dan formulir kantor.
3. Mengelola sumber daya manusia, termasuk file personalia.
4. Mengelola register surat masuk dan keluar.
5. Membantu kebutuhan bagian lain.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM